

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Obyek Penelitian Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati

1. Keadaan Geografis

a. Keadaan Alam serta Geografi

1) Letak Kecamatan

Kecamatan Tambakromo terletak 18 Km arah selatan dari Kabupaten.

2) Batas – batas :

Sebelah Utara : Kecamatan Gabus
Sebelah Timur : Kecamatan Winong
Sebelah Selatan : Kecamatan Grobogan
Sebelah Barat : Kecamatan Kayen”

3) Jarak dari Kecamatan Tambakromo ke kota Pati serta kota lain:

Pati	: 18 Km
Kudus	: 41 Km
Jepara	: 77 Km
Semarang	: 92 Km
Jakarta	: 577 Km
Bandung	: 459 Km
Solo	: 92 Km
Yogyakarta	: 160 Km
Rembang	: 53 Km
Blora	: 89 Km
Surabaya	: 245 Km

2. Kondisi Demografis

Luas wilayah Kecamatan Tambakromo 7.247 ha dengan jumlah penduduk 62,477 jiwa, jenis kelamin laki-laki 30,342 jiwa, Jenis Kelamin perempuan 32,135 jiwa serta kepadatan 862,1 jiwa/km² dengan rincian tabel seperti berikut :

Tabel 4.1
Status Indek Desa Membangun (IDM) Menurut Desa
Di Kecamatan Tambakromo Tahun 2020 – 2021

No	Desa	Status Desa	
		2020	2021
1	Pakis	Berkembang	Berkembang
2	Maitan	Berkembang	Maju
3	Wukirsari	Berkembang	Berkembang
4	Sinomwidodo	Berkembang	Berkembang
5	Keben	Berkembang	Berkembang
6	Larangan	Berkembang	Berkembang
7	Tambakromo	Maju	Maju
8	Mojomulyo	Berkembang	Berkembang
9	Karangawen	Berkembang	Berkembang
10	Mangunrekso	Berkembang	Berkembang
11	Tambaharjo	Berkembang	Berkembang
12	Tambahagung	Berkembang	Berkembang
13	Sitirejo	Berkembang	Maju
14	Kedalingan	Maju	Maju
15	Karangmulyo	Maju	Maju
16	Karangwono	Berkembang	Maju
17	Angkatan Lor	Maju	Maju
18	Angkatan Kidul	Berkembang	Berkembang

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat serta Desa Kabupaten Pati

Tabel 4.2
Luas Wilayah menurut Desa dan Penggunaan Lahan di
Kecamatan Tambakromo (ha) *

No	Desa	Lahan Pertanian		Lahan Bukan Pertanian	Luas Wilayah
		Sawah	Bukan Sawah		
1	Pakis	377	43	166	209
2	Maitan	591	97	261	358
3	Wukirsari	383	70	169	239

4	Sinomwidodo	205	251	90	341
5	Keben	148	242	66	308
6	Larangan	293	75	130	205
7	Tambakromo	46	233	21	254
8	Mojomulyo	40	136	18	154
9	Karangawen	252	98	112	210
10	Mangunrekso	102	287	45	332
11	Tambaharjo	71	232	31	263
12	Tambahagung	96	325	44	369
13	Sitirejo	30	203	13	216
14	Kedalingan	58	173	25	198
15	Karangmulyo	52	111	23	134
16	Karangwono	78	96	35	131
17	Angkatan Lor	78	139	36	175
18	Angkatan Kidul	79	136	36	172
	Jumlah	2.947	2.979	1.321	4.268

Sumber : Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Tambakromo

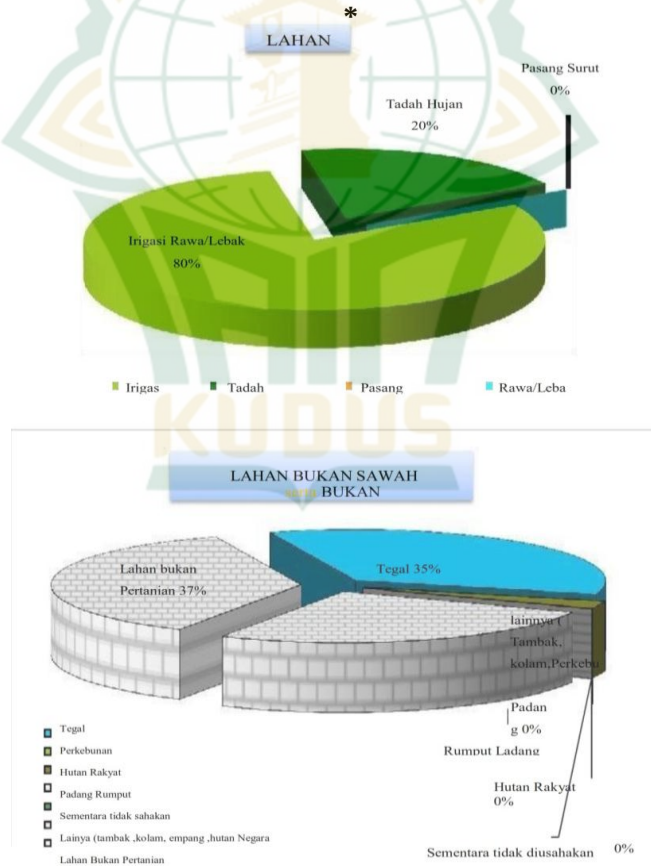
Tabel 4.3
Luas Wilayah menurut Penggunaan Lahan di Kecamatan Tambakromo (ha) *

No	Penggunaan Lahan	Luas (ha)	Prosentase (%)
A	Lahan Pertanian	5.926	81,77
1	Lahan Sawah	2.947	40,67
1.1	Irigasi Teknis	1.388	19,15
1.2	Irigasi 1/2 Teknis	0	0
1.3	Irigasi Sederhana	0	0
1.4	Irigasi Desa/Non PU	0	0
1.5	Tadah Hujan	1 559	21,51
1.6	Pasang surut	0	0
2	Lahan Bukan Sawah	2 979	41,11
2.1	Tegal/Kebun	414,00	19,51
2.2	Padang rumput	0	0
2.3	Hutan Rakyat	100	1,38
2.4	Hutan Negara	1 465	20,22
2.5	Perkebunan	0	0

2.6	Rawa-rawa	0	0
2.7	Tambak	0	0
2.8	Kolam	0	0
B	Lahan Pertanian Bukan	1.321	18,23
1	Rumah Pekarangan serta	1.321	18,23
2	Tanah Lainnya	0	0
	Jumlah	7.247	281,77

Sumber : Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Tambakromo

Gambar 4.1
Luas dan Prosentase Penggunaan Lahan Sawah, Lahan Bukan Sawah dan Lahan Bukan Pertanian di Kec.Tambakromo 2020



3. Kondisi Penduduk, Perekonomian dan Penyebarannya

a. Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Data kependudukan yang ditampilkan pada publikasi ini ialah data hasil proyeksi penduduk tengah tahun 2021. Jumlah penduduk Kecamatan Tambakromo pada tengah tahun 2021 ialah 62,477 jiwa yang terdiri dari Penduduk Laki-laki 30,342 jiwa Penduduk Perempuan 32,135 jiwa. Dari 18 desa di Kecamatan Tambakromo, Desa Maitan mempunyai penduduk terbanyak dibanding dengan desa yakni sebanyak 6,284 jiwa.

b. Kepadatan Penduduk serta Keadaan Ekonomi

Kepadatan penduduk ialah banyaknya penduduk per km persegi. Kecamatan Tambakromo mempunyai luas wilayah senilai 4.268 ha. Dengan jumlah penduduk mencapai 55.274 jiwa pada tengah tahun 2019, maka Kecamatan Tambakromo secara umum mempunyai kepadatan penduduk 1.178 jiwa per km2, dengan rincian jumlah penduduk per desa adalah :

Tabel 4.4
Banyaknya Penduduk menurut Desa dan Jenis Kelamin di Kecamatan Tambakromo, Tahun 2021 (jiwa)

No	Desa	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Angkatan Kidul	1,517	1,550	3,067
2	Angkatan Lor	2,001	1,872	3,873
3	Karangawen	953	880	1,833
4	Karangmulyo	912	879	1,791
5	Karangwono	1,760	1,852	3,612
6	Keben	1,964	2,151	4,115
7	Kedalingan	1,405	1,476	2,881
8	Larangan	512	521	1,033
9	Maitan	3,000	3,284	6,284
10	Mangunrekso	2,010	2,009	4,019
11	Mojomulyo	2,102	2,930	5,032
12	Pakis	1,351	1,274	2,625
13	Sinomwidodo	2,746	3,147	5,893
14	Sitirejo	1,298	1,337	2,635
15	Tambahagung	2,452	2,441	4,893
16	Tambaharjo	2,013	1,987	4,000
17	Tambakromo	2,346	2,545	4,891
18	Wukirsari	808	811	1,619

	Jumlah	30,342	32,135	62,477
--	---------------	--------	--------	--------

Sumber : IDM Kemendesa Tahun 2021

Keadaan ekonomi penduduk wilayah Kecamatan Tambakromo rata- rata penduduknya berprofesi sebagai petani serta status semua desa di kecamatan Tambakromo masuk pada kategori tiga ataupun berkembang. Guna memberi peningkatan perekonomian masyarakat, maka sangat dibutuhkan adanya sarana perekonomian sebagai penunjang berputarnya roda perekonomian. Adapun beberapa sarana yang ada di wilayah Kecamatan Tambakromo seperti pasar, toko, warung koperasi, serta bank. Pengertian Pasar ialah tempat di lakukannya transaksi antara penjual serta pembeli untuk kegiatan ekonomi, Toko ialah tempat usaha di bangunan tetap yang menjual barang keperluan sehari- hari secara eceran serta tidak mempunyai sistem pelayanan mandiri biasanya di kelola oleh satu penjual. Warung/ kedai ialah tempat usaha yang menjual makanan serta minuman siap saji yang di jual di bangunan yang tetap serta tidak mempunyai surat ijin usaha. Untuk melihat sarana prasarana yang ada di wilayah Kecamatan Tambakromo bisa ditinjau tabel berikut :

Tabel 4.5
Banyaknya Pasar dan Pasar Hewan menurut desa di Kecamatan Tambakromo Tahun 2021

No	Desa	Pasar	Pasar Hewan	Warung serta Toko Klontong
1	Angkatan Kidul	0	0	25
2	Angkatan Lor	1	0	105
3	Karangawen	0	0	20
4	Karangmulyo	0	0	20
5	Karangwono	0	0	48
6	Keben	0	0	46
7	Kedalingan	0	0	65
8	Larangan	0	0	14
9	Maitan	1	0	75
10	Mangunrekso	0	0	45
11	Mojomulyo	0	0	20
12	Pakis	0	0	8

13	Sinomwidodo	1	0	75
14	Sitirejo	0	0	23
15	Tambahagung	0	0	22
16	Tambaharjo	0	0	95
17	Tambakromo	1	0	95
18	Wukirsari	0	0	30
	Jumlah	4	0	831

Sumber : IDM Kemendesa Tahun 2021

Tabel 4.6
Banyaknya Produksi Masyarakat Mikro dan Kecil di
Kecamatan Tambakromo, Tahun 2021

No	Desa	Komoditas Produksi		
		Rumah Tangga	Pertanian	Peternak an
1	Angkatan Kidul	18	3	0
2	Angkatan Lor	167	1	2
3	Karangawen	5	2	2
4	Karangmulyo	20	8	9
5	Karangwono	40	4	3
6	Keben	8	0	16
7	Kedalingan	45	3	3
8	Larangan	0	0	11
9	Maitan	15	0	2
10	Mangunrekso	28	3	1
11	Mojomulyo	18	9	5
12	Pakis	2	0	0
13	Sinomwidodo	56	5	11
14	Sitirejo	4	0	0
15	Tambahagung	20	0	4
16	Tambaharjo	76	5	4
17	Tambakromo	13	3	2
18	Wukirsari	10	5	4
	Jumlah	545	51	79

Sumber : IDM Kemendesa Tahun 2021

Tabel 4.7
Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Tambakromo
Tahun 2021

No	Desa	Nama BUMDE S	Bidang Usaha	Omset /Tahun
1	Angkatan Kidul	Bina Mulya	Peternakan	203,988,383
2	Angkatan Lor	Sejahtera Abadi	Simpan Pinjam	10,000,000
3	Karangawen	Selamat Mandiri	Peternakan	7,000,000
4	Karangmulyo	Dadi Mulyo	Simpan Pinjam	521,224,100
5	Karangwono	Bina Niaga	Simpan Pinjam	100,162,000
6	Keben	Sido Maju	Perdagangan	282,184,640
7	Kedalingan	Manunggal Jaya	Simpan Pinjam	45,000,000
8	Larangan	Sido Makmur	Simpan Pinjam	223,373,600
9	Maitan	Lancar Jaya	Simpan Pinjam	182,733,000
10	Mangunrekso	Mangunjoyo	Simpan Pinjam	5,000,000
11	Mojomulyo	Bregas Janaloka	Simpan Pinjam	60,000,000
12	Pakis	Bina Sentosa	Simpan Pinjam	176,281,000
13	Sinomwidodo	Bumdes Amrih Widodo	Perdagangan	625,000,000
14	Sitirejo	Sido Mulyo	Simpan Pinjam	30,000,000
15	Tambahagung	Rukun Makaryo	Simpan Pinjam	136,292,500
16	Tambaharjo	Ngudi Berkah	Perdagangan	373,732,000
17	Tambakromo	Jana Gada	-	0

18	Wukirsari	Bina Lestari	Perdagang an	118,709, 000
----	-----------	-----------------	-----------------	-----------------

Sumber : IDM Kemendesa Tahun 2021

Tabel 4.8
Banyaknya Keluarga Menurut Tahapan Keluarga
Sejahtera di Kecamatan Tambakromo Tahun 2017 – 2019

No	Tahapan Keluarga Sejahtera	2017	2018	2019
1	Pra Keluarga Sejahtera (Pra KS)	7,736	8,166	8,262
2	Keluarga Sejahtera 1 (KS-1)	1,049	1,039	1,049
3	Keluarga Sejahtera (KS)	8,351	8,443	8,443
Jumlah Tahapan Keluarga Sejahtera		17,136	17,648	17,754
Jumlah Kepala Keluarga				17,136

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Pati (Kecamatan
Tambakromo dalam angka 2020)

c. Penduduk Usia Produktif serta tidak Produktif

Penduduk usia kerja ialah penduduk yang dari segi ekonomi dianggap tidak mampu bekerja karena menjalankan kegiatan produksi secara mandiri dari segala kebutuhan. Batas untuk penduduk yang tidak bekerja ialah 0-14 serta 65 tahun ke atas, tetapi banyak orang yang berusia di atas 65 tahun, termasuk anak-anak di bawah usia 15 tahun, masih bisa bekerja serta banyak yang sudah mencari nafkah. Dari penjumlahan penduduk usia kerja serta penduduk bukan usia kerja, kita bisa melihat jika jumlah tanggungan ialah angka yang memperlihatkan jumlah penduduk bukan usia kerja (0-14 serta 65+) di setiap pekerjaan. Perlu dukungan (15-64 tahun). Tabel ini memperlihatkan jumlah penduduk usia kerja serta bukan usia kerja.

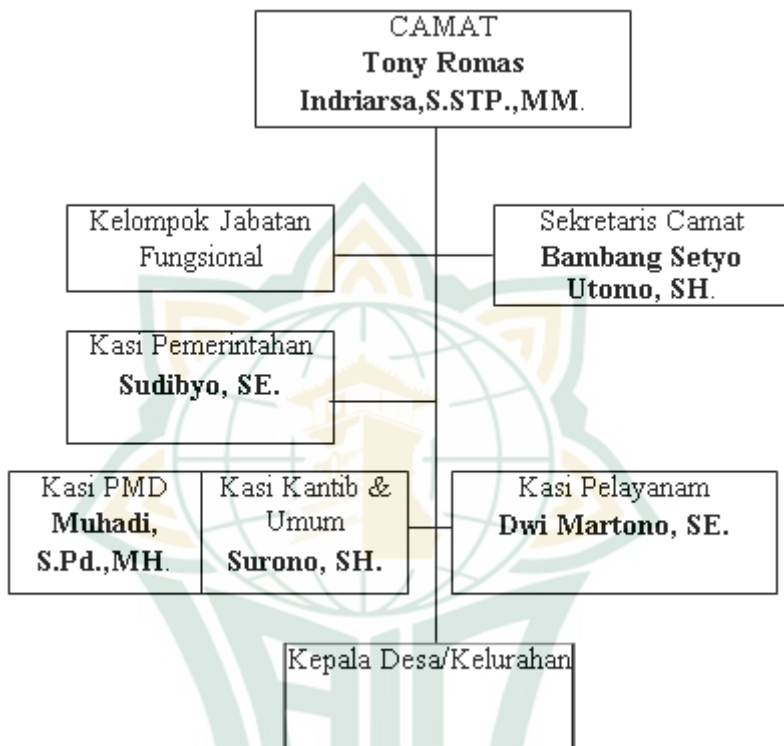
Tabel 4.9
Penduduk Usia Tidak Produktif dan Produktif
Menurut Desadi Kecamatan Tambakromo Tahun 2019
(jiwa)

No	Desa	Usia Tidak Produktif (Th)			Usia Produktif	Jumlah Penduduk
		0-14	65+	Jumlah	15-64	
1	Pakis	438	148	586	1259	1845
2	Maitan	991	490	1481	2983	4464
3	Wukirsari	269	156	437	732	1159
4	Sinomwidodo	1204	622	1826	4052	5878
5	Keben	797	377	1174	2688	3862
6	Larangan	214	88	302	608	910
7	Tambakromo	938	491	1429	3109	4538
8	Mojomulyo	647	239	886	2103	289
9	Karangawen	337	167	504	1034	1538
10	Mangunreksa	533	247	780	1814	2594
11	Tambaharjo	711	278	989	2410	3399
12	Tambahagung	691	286	977	2351	3328
13	Sitirejo	537	248	785	1928	2713
14	Kedalingan	521	265	986	1474	2213
15	Karangmulyo	321	147	468	996	1464
16	Karangwono	536	295	831	1634	2465
17	Angkatan Lor	581	327	908	1883	2791
18	Angkatan Kidul	475	234	709	1358	2067
Kec. Tambakromo		10741	5117	15858	34416	50274
Kabupaten Pati		273881	864409	1138290	121300	1259590

Sumber : BPS Kabupaten Pati, Sensus Penduduk 2010

4. Struktur Pemerintahan Kecamatan Tambakromo

Tabel 4.10
Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Tambakromo
Tahun 2021



Keterangan : Perda no.8 Tahun 2000 mengenai pembentukan organisasi kecamatan desa/kelurahan.

5. Tingkat Sumber Daya Manusia

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting sebagai sarana peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan termasuk variabel input yang mempunyai dampak kuat terhadap kualitas manusia sebagai individu serta masyarakat. Hasilnya ialah produktivitas, kreativitas, etos kerja serta kemandirian. Indikator kemajuan penduduk yang sering dipakai ialah status, tingkat pendidikan tertinggi, partisipasi, serta keterampilan membaca serta bahasa. Tabel di bawah ini memperlihatkan rata-rata siswa SD, SMP, serta SMA menurut desa:

Tabel 4.11
Banyaknya Sekolah, Guru dan Murid di Bawah Dinas
Pendidikan di Kecamatan Tambakromo 2019

No	Uraian	Sekolah	Guru	Murid
1	Taman Kanak-kanak (TK)	25	92	330
	- Negeri	0	0	0
	- Swasta	25	92	330
2	Sekolah Dasar (SD)	32	353	4133
	- Negeri	32	353	4133
	- Swasta	0	0	0
3	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	5	116	1319
	- Negeri	5	116	1319
	- Swasta	0	0	0
4	Sekolah Menengah Umum (SMU)	0	0	0
	- Negeri	0	0	0
	- Swasta	0	0	0
5	Sekolah Menengah Umum (SMK)	0	0	0
	- Negeri	0	0	0
	- Swasta	0	0	0

Sumber : Dinas Pendidikan serta Kebudayaan Kabupaten Pati serta Balai Pengendali Pendidikan Menengah serta Khusus (BP2MK) Wilayah II Pati

6. Kesehatan dan Keluarga Berencana

Penyuluhan bidang kesehatan mempunyai tujuan supaya seluruh lapisan masyarakat memperoleh layanan kesehatan dengan mudah, murah serta merata. Upaya tersebut diharapkan bisa mencapai derajat kesehatan masyarakat yang baik. Salah satu tujuan pembangunan kesehatan ialah memberi peningkatan kesehatan anak balita. Berbagai upaya sedang dijalankan untuk mengurangi angka kematian anak serta memberi peningkatan harapan hidup. Upaya tersebut berkaitan dengan persalinan, vaksinasi, menyusui, serta pengelolaan gizi anak di bawah usia lima tahun.

Penggalakan program KB sebagai suatu usaha memberi peningkatan kemakmuran masyarakat melalui pengendalian angka kelahiran juga sudah memperlihatkan peningkatan. tase peserta KB aktif di wilayah kecamatan Tambakromo yakni mencapai 80%

terhadap pasangan usia subur (PUS).

7. Agama

Tempat ibadah ialah bangunan/ruang permanen yang khusus diperuntukkan bagi peribadatan masyarakat umum menurut agamanya, tanpa memandang kepemilikannya, termasuk bangunan/ruang tetap untuk peribadatan pada lembaga-lembaga publik.

Tempat peribadatan merupakan hal penting yang harus ada di setiap kota. Sarana tempat peribadatan tersebut dibangun untuk memenuhi kebutuhan spiritual umat beragama dalam melaksanakan kewajiban beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adapun jumlah tempat ibadah di kawasan Tambakromo bisa ditinjau dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.12
Banyaknya Sarana Peribadatan Menurut Jenisnya di
Kecamatan Tambakromo Tahun 2017 - 2019

No	Uraian	2017	2018	2019
1	Masjid	63	64	64
2	Gereja Kristen	0	4	4
3	Gereja Katolik	0	0	0
4	Vihara	0	0	0
5	Pura	0	0	0
6	Musholla / Langgar	276	276	276

Sember : Kementrian Agama Islam Pati

B. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Padat Karya Tunai Dana Desa

a. Perencanaan Dana Desa di Kecamatan Tambakromo

Rencananya dalam tahapan awal pengelolaan dana desa, di mana setiap pemukiman bakal mengadakan Musyawarah Dusun (Musdus) untuk menerima saran dari masyarakat mengenai program kerja yang bakal dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan. Sementara itu, pemerintah desa sedang membahas rencana pembangunan desa, termasuk RPJMDesa serta RKPDesa. RPJMDesa ialah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang dijadikan pedoman serta referensi dalam pembangunan selama 6 (enam) tahun ataupun kepala desa menjabat. Didalam RPJMDesa memuat Visi Misi kepala desa serta potensi kekayaan desa baik dari segi Sumber Daya Manusia ataupun Sumber Daya Alam, Sedangkan RKPDesa ialah Rencana Kerja Pemerintah

Desa pada tahun yang bakal datang, serta bersifat teknis, karena memuat arah pembangunan desa selama satu tahun . RKPDesa mulai disusun di bulan Juli tahun berjalan serta dilaksanakan melalui Musren bangdes. Rancangan RKPDesa dilampiri Rancangan Pembangunan Desa (RPD) persumber dana (PAD, DD, PBK, PBP, Hasil Pajak, Dll) serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dilakukan penyusunan berdasarkan indek harga kabupaten.¹⁹

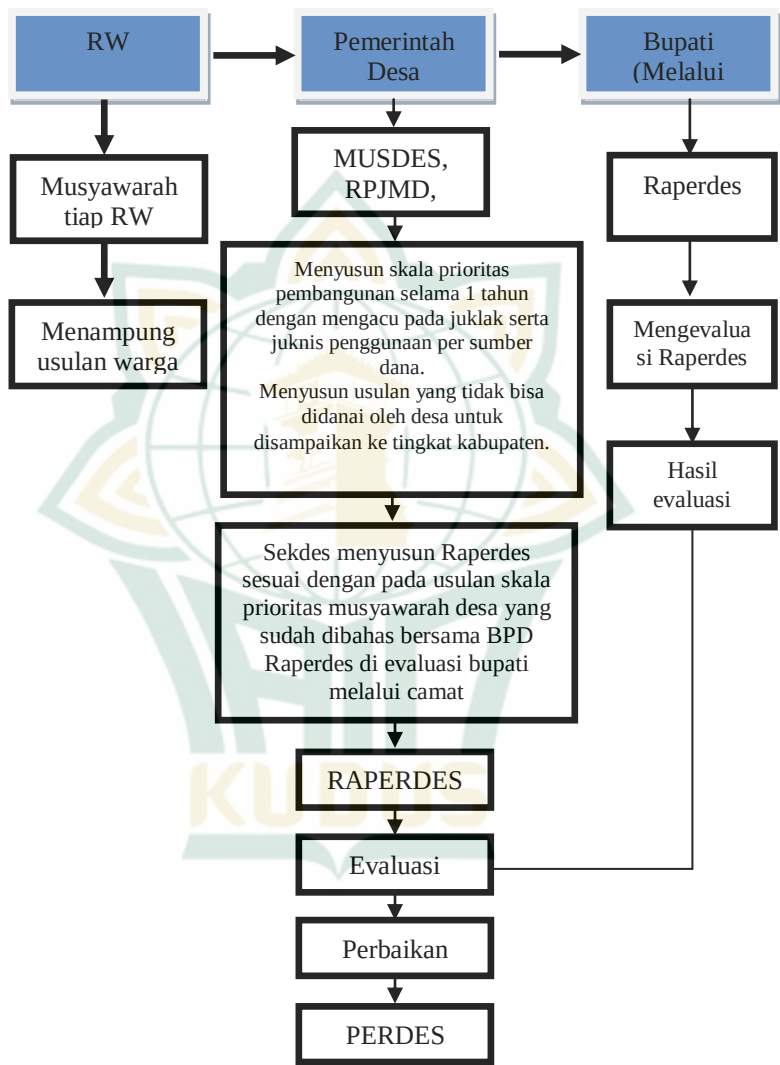
Badan Permusyawarahan Desa selanjutnya menyelenggarakan Musrenbangdes untuk bersama-sama dengan pemerintah desa, lembaga desa, perwakilan masyarakat, untuk membahas serta memberi suara atas rancangan RKP Desa, serta membahas prioritas program kerja yang dilaksanakan dalam Musdus atas usulan pemerintah kota. Dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa tersebut juga merumuskan pembangunan yang direncanakan dan tidak bisa dibiayai oleh desa. Selanjutnya usulan tersebut di sampaikan pada musyawarah pembangunan tingkat kecamatan, yang akan didanai oleh kabupaten.

Rancangan RKPDesa Ordonansi Desa sudah dibahas serta disepakati bersama oleh kepala desa serta BPD untuk disahkan menjadi RKPDesa Ordonansi Desa.²⁰ Ini termasuk tahap perencanaan oleh Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018. Status perencanaan bisa ditinjau pada foto di bawah ini:

¹⁹ AdrianPuspawijaya, “*Pengelolaan Keuangan Desa*” (Jakarta: Pusdiklatwas, 2016), 30.

²⁰ AdrianPuspawijaya,31

Gambar 4.2
Tahap Perencanaan Pengelolaan Dana Desa di
Kecamatan Tambakrom



Di sisi lain, dalam tahapan perencanaan, desa mempunyai tim khusus yang mempunyai tugas menyusun Raperdes. hal itu terlihat dari hasil wawancara Kasi PMD Kecamatan Tambakromo pada hari Senin, 27 Mei 2022 di kantor kecamatan Tambakromo menjelaskan jika :

Berdasarkan Keterangan Bapak Muhadi Kasi PMD : bahwa Tim perencanaan terdiri dari seorang ketua, ataupun sering juga seorang koordinator, sekretaris, bendahara, serta anggota. Tim nantinya bakal membuat Raperdes pada APBD kemudian membahas serta menyepakati BPD untuk membuat peraturan desa.²¹

Kasi PMD Kecamatan Tambakromo juga menyatakan jika pemerintahan di wilayah Kecamatan Tambakromo menerapkan prosedur pengelolaan dana desa sesuai dengan aturan yang berlaku.

Akuntabilitas desa di wilayah Kecamatan Tambakromo bisa melihatnya dari peraturan desa yang terlampir di papan kegiatan desa baik perdes realisasi ataupun APBDesa. Terkait transparansi dengan hadir musyawarah seluruh RW serta musrenbangdes berbentuk transparansi, dibahas secara bersama-sama tanpa ada yang ditutupi, meskipun prinsip partisipasi berlaku, kami selalu berjanji untuk melibatkan masyarakat dalam semua aktivitas yang berkaitan dengan dana desa. Pemerintah desa sedang mengumpulkan perangkat desa lainnya dalam rencana berkumpul di Musrenbangdes untuk partisipasi masyarakat di sini. Masyarakat sangat antusias serta selalu menanyakan kapan program yang direncanakan bakal dilaksanakan.²²

Musrenbangdes ialah forum diskusi rencana pembangunan tingkat desa yang diusulkan sesuai dengan Prinsip-Prinsip Rencana Pembangunan Partisipasi Desa (P3MD).²³

Asas ini menuntut keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan serta keputusan pembangunan yang bakal dijalankan, terutama yang ada di desa yang bersangkutan, supaya benar-benar bisa menjawab kebutuhan serta aspirasinya yang berkembang. Di setiap Muslen Bandes, pemerintah desa bekerja sama dengan BPD untuk mempertemukan lembaga masyarakat lainnya seperti RT, RW, tokoh masyarakat serta organisasi pemuda untuk mengumpulkan pendapat mengenai apa yang dibutuhkan. hal itu senada dengan pernyataan Ketua

²¹ Muhadi, wawancara oleh penulis, 23 Mei 2022, wawancara 1, transkrip.

²² Muhadi, wawancara oleh penulis, 23 Mei 2022, wawancara 1, transkrip.

²³ Dwi Febri, Kurrohman, Taufik, "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember," Jurnal Riset Akuntansi serta Keuangan. Jember, no.2 (2014):473-485.

PMD Kecamatan Tambakromo jika pemerintah desa mengundang seluruh elemen masyarakat, antara lain BPD, RT, RW, tokoh masyarakat, PKK, organisasi kepemudaan serta lembaga masyarakat lainnya.²⁴

Kasi PMD Kecamatan Tambakromo juga menyatakan jika untuk tahun 2021 difokuskan dalam pembangunan non infrastruktur serta penanganan covid-19, hal itu bisa ditinjau dari hasil Musrenbangdes di wilayah Kecamatan Tambakromo bisa ditinjau dari tabel berikut ini :

Tabel 4.13
Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa
di Kecamatan Tambakromo Tahun 2021

NO	DESA	ANGGARAN				
		BID AN NG 1	BID AN G 2	BID AN G 3	BIDA NG 4	BIDA NG 5
	1	2	3	4	5	6
1	PAKIS	580,1 06,64 4	477, 021, 000	15,0 00,0 00	15,00 0,000	709,2 14,00 0
2	MAITAN	589,3 77,77 2	792, 890, 000	15,0 00,0 00	15,00 0,000	487,2 15,00 0
3	WUKIRSARI	471,8 25,15 0	1,08 1,78 9,00 0	48,2 74,0 00	48,27 4,000	196,3 00,00 0
4	SINOMWIDODO	671,8 33,03 5	822, 896, 000	117, 000, 000	117,0 00,00 0	533,7 14,37 0
5	KEBEN	442,0 00,59 6	1,38 0,39 9,26 1	34,9 50,0 00	34,95 0,000	572,4 00,00 0
6	LARANGAN	341,3 69,36 2	1,04 6,23 4,00 0	62,2 50,0 00	62,25 0,000	241,4 26,62 2
7	TAMBAKROMO	613,6 59,95 5	1,70 1,93 6,04 5	13,8 29,4 45	13,82 9,445	410,9 60,00 0
8	MOJOMULYO	429,9 76,00 0	1,17 0,93 7,00	0	0	518,8 00,00 0

²⁴ Muhadi, wawancara oleh penulis, 23 Mei 2022, wawancara 1, transkrip.

			0			
9	KARANGAWEN	503,7 02,21 0	1,49 6,10 9,58 7	0	0	341,8 37,21 6
10	MANGUNREKSO	652,9 00,01 8	1,12 9,14 7,31 3	240, 457, 100	240,4 57,10 0	238,3 36,30 4
11	TAMBAHARJO	768,0 16,59 2	830, 455, 310	34,2 74,0 00	34,27 4,000	937,6 08,62 6
12	TAMBAHAGUNG	902,1 79,50 8	538, 364, 596	2,16 5,00 0	2,165, 000	897,4 81,00 0
13	SITIREJO	555,4 55,92 3	348, 118, 000	45,3 38,0 00	45,33 8,000	369,2 19,00 0
14	KEDALINGAN	472,9 12,13 9	1,77 3,49 4,00 0	0	0	524,4 50,00 0
15	KARANGMULYO	432,7 88,47 1	683, 523, 000	30,0 00,0 00	30,00 0,000	508,2 00,00 0
16	KARANGWONO	472,9 87,42 2	1,37 8,84 5,00 0	20,0 08,0 00	20,00 8,000	325,6 48,09 0
17	ANGKATAN LOR	483,8 22,22 3	1,89 5,74 8,00 0	112, 760, 000	112,7 60,00 0	188,6 10,00 0
18	ANGKATAN KIDUL	496,0 56,16 9	320, 180, 510	30,1 00,0 00	30,10 0,000	590,2 89,70 8
JUMLAH		9,880, 969,1 89	18,8 68,0 87,6 22	1,30 4,31 6,18 0	821,4 05,54 5	8,591, 709,9 36

Keterangan : Sumber Siskeudes 2021

Keterangan :

- 1) Bidang 1 : Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- 2) Bidang 2 : Pelaksanaan Pembangunan Desa
- 3) Bidang 3 : Pembinaan Kemasyarakatan
- 4) Bidang 4 : Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 5) Bidang 5 : Penanganan Bencana serta mendesak

Prinsip terpenting dalam Musrenbangdes ialah partisipasi serta transparansi perangkat desa. Rata-rata desa di Kecamatan Tambakromo menerapkan prinsip partisipasi serta transparansi. Prinsip partisipasi tercermin dari komitmen pemerintah desa supaya senantiasa mengundang beberapa lembaga masyarakat untuk berpartisipasi dalam Musrenbangdes. Prinsip transparansi bisa ditinjau dari adanya peraturan desa yang ditentukan sesudah hasil musrenbangdes disepakati.

Hal ini didukung oleh Keterangan Sekdes Tambahagung, jika Akuntabilitas bisa ditinjau bagaimana proses penyusunan perdes APBDes ataupun Perdes yang yang lain, di desa kedalingan alhamdulillah kita lakukan sesuai regulasi yang ada, sedangkan masalah transparansi, kita selalu menampung aspirasi dari masyarakat, serta kita pilah Usulan mana yang menjadi prioritas serta mendesak untuk dilaksanakan. serta kita juga harus melihat Anggarannya apakah cukup apa tidak.²⁵

Dari keterangan di atas, terlihat jelas jika partisipasi masyarakat desa di kecamatan Tambakromo sangat antusias. Jika mereka memperoleh undangan pertemuan di Dusun ataupun Kelurahan, mereka dengan senang hati bakal hadir serta berkontribusi untuk memberi pendapat serta pendapatnya untuk kepentingan masyarakat.

Penyusunan Perencanaan untuk Pengelolaan Dana Desa sudah sesuai dengan Aturan yang ada serta itu ialah bentuk akuntabilitas, untuk transparansi bisa ditinjau di website desa Tambahagung, Facebook, ataupun Infografis serta Papan Kegiatan pengelolaan Dana Desa.sudah kita publikasikan semua baik perencanaan, realisasi pelaksanaannya, komplit mas.²⁶

Dari sisi transparansi, pemerintah desa di kecamatan Tambakromo berusaha setransparan mungkin. Menurut hasil wawancara di sejumlah desa di kecamatan Tambakromo, pemerintah desa selalu memberi informasi hasil musrenbangdes dengan menetapkan peraturan desa (perdes). Menurut narasumber yang diwawancarai peneliti, setiap kali peraturan desa diterbitkan, bakal dipasang di papan pengumuman desa.

Pernyataan Camat Tambakromo PMD, Kepala Desa, serta Sekretaris Desa di atas sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa elemen masyarakat desa. Lima narasumber

²⁵ Joko Waluyo, wawancara oleh penulis, 2 Juni 2022, wawancara 2, transkrip.

²⁶ Kabul Wahyudi, wawancara oleh penulis, 6 Juni 2022, wawancara 3, transkrip.

- yang diwawancarai mengatakan diundang untuk menghadiri Musyawarah (Musdus) serta Musrenbangdes.
2. Persiapan Pelaksanaan kegiatan padat Karya Tunai Dana Desa di Kecamatan Tambakromo

Tahap Persiapan ialah pekerjaan yang di lakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan desa. Tahap persiapan ini meliputi penyusuna Reencana Anggaran Belanja (RAB), rekrutmen tenaga kerja yang memenuhi kreteria, serta admistrasi lain sebagai pendukung kegiatan, hal itu sesuai apa yang diungkapkan oleh Sekretaris desa Tambahagung jika Dokumen yang disiapkan, Foto Copy KTP, KK, Daftar Hadir Peserta serta RAB yang sudah ditantangani kepala desa.²⁷

Sedangkan kreteria masyarakat yang bakal dilibatkan dalam aktivitas padat Karya Tunai dana desa sebagaimana yang disampaikan kepala desa Kedalingan dilibatkan dalam Aktivitas padat Karya Tunai meliputi Masyarakat yang masuk pada kategori menganggur, setengah menganggur, kepala keluarga wanita, keluarga yang mempunyai Anggota keluarga sakit kronis.²⁸

Selain keterangan yang disampikan bapak Joko Waluyo selaku kepala desa Kedalingan, keterangan lain yang sama juga diungkapkan oleh ketua Tim Pelaksana Kegiatan desa Larangan jika Dengan musyawarah Desa, serta Tim Pelaksana Kegiatan mensurvei lokasi serta menghitung Rencana Anggaran Belanja.²⁹

Dari uraian diatas, jika aktivitas padat Karya Tunai dana desa memang dipersiapkan serta melibatkan masyarakat yang kurang mampu, berikut data perencanaan Penggunaan dana desa di Kecamatan Tambakromo tahun 2021:

Tabel 4.14
Perencanaan Penggunaan Dana Desa
Kecamatan Tambakromo Tahun 2021

No	Desa	Anggaran Bidang					
		1	2	3	4	5	6
1	PAKIS	31,38 7,900	277,0 21,00 0	0	15,0 00,0 00	709, 214, 000	7,221, 100
2	MAITAN	64,38 7,750	789,3 90,00 0	0	15,0 00,0 00	487, 215, 000	79,37 8,750
3	WUKIRSARI	23,24	880,7	0	48,2	196,	145,5

²⁷ Kabul Wahyudi, wawancara oleh penulis, 6 Juni 2022, wawancara 3, transkrip

²⁸ Joko Waluyo, wawancara oleh penulis, 2 Juni 2022, wawancara 2, transkrip.

²⁹ Irmatus Sa'adah, wawancara oleh penulis, 10 Juni 2022, wawancara 4, transkrip.

		6,000	89,00 0		74,0 00	300, 000	39,00 0
4	SINOMWIDODO	55,00 0,000	549,0 96,00 0	0	117, 000, 000	522, 000, 000	6,000, 000
5	KEBEN	25,00 0,000	412,8 77,00 0	0	31,9 50,0 00	572, 400, 000	4,900, 000
6	LARANGAN	18,00 0,000	596,2 34,00 0	0	62,2 50,0 00	235, 259, 500	10,00 0,000
7	TAMBAKROMO	0	815,9 35,00 0	0	0	367, 215, 000	0
8	MOJOMULYO	0	770,9 37,00 0	0	0	518, 800, 000	15,00 0,000
9	KARANGAWEN	8,050, 000	696,5 06,60 0	0	0	316, 600, 000	0
10	MANGUNREKSO	34,54 0,000	373,0 00,00 0	317, 600, 000	40,4 60,0 00	213, 336, 304	5,000, 000
11	TAMBAHARJO	3,500, 000	229,3 90,00 0	0	34,2 74,0 00	913, 030, 000	0
12	TAMBAHAGUNG	57,30 2,500	101,0 70,00 0	0	2,16 5,00 0	888, 481, 000	0
13	SITIREJO	7,200, 000	212,1 18,00 0	299, 716, 000	45,3 38,0 00	369, 219, 000	30,00 0,000
14	KEDALINGAN	38,62 8,300	656,1 95,00 0	0	0	524, 450, 000	28,85 8,700
15	KARANGMULYO	25,13 0,000	583,5 23,00 0	0	30,0 00,0 00	508, 200, 000	41,25 2,000
16	KARANGWONO	20,95 0,000	573,6 50,00 0	0	20,0 08,0 00	324, 600, 000	16,50 0,000
17	ANGKATAN LOR	57,77 2,000	839,4 32,00 0	0	112, 760, 000	188, 610, 000	20,00 0,000
18	ANGKATAN KIDUL	38,82 3,500	284,6 44,50 0	0	30,1 00,0 00	580, 300, 000	30,00 0,000
Jumlah		508,91 7,950	9,641,8 08,100	617, 316,	604, 579,	8,43 5,22	439,64 9,550

			000	000	9,80 4	
--	--	--	-----	-----	-----------	--

Keterangan : Sumber Siskeudes 2021

Keterangan :

- a. Bidang 1 : Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- b. Bidang 2 : Pelaksanaan Pembangunan Desa
- c. Bidang 3 : Pembinaan Kemasyarakatan
- d. Bidang 4 : Pemberdayaan Masyarakat Desa
- e. Bidang 5 : Penanganan Bencana serta mendesak
- f. Bidang 6 : Penyertaan Modal BUMDES

Dari Tabel tersebut bisa ditinjau jika bidang Pembangunan masih sangat dominan di penganggaran, kemudian kegiatan penanganan covid 19, termasuk didalamnya Bantuan Langsung Tunai (BLT), serta kegiatan Pemberdayaan Masyarakat. Adapun bidang pembangunan termasuk didalamnya Aktivitas padat Karya Tunai yang melibatkan masyarakat setempat.

3. Pelaksanaan kegiatan padat Karya Tunai Dana Desa di Kecamatan Tambakromo

Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sebenarnya dimulai dengan rencana desa yang tertuang dalam RPJM serta RCP Desa. Namun, tahap implementasi lebih sering diidentifikasi dalam proses realisasi anggaran. Ketika aktivitas yang dibiayai DD dilaksanakan, sepenuhnya dijalankan oleh tim pelaksana desa (pemerintah desa). Selanjutnya tim pelaksana desa membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk menjalankan program kegiatan di lapangan.

Di desa-desa di kecamatan Tambakromo, tim pelaksana kegiatan terdiri dari 5-8 anggota yang disupervisi langsung oleh PTPKD, ataupun tim pelaksana desa yang dikoordinir oleh kepala desa yang mempunyai tugas menjalankan, memantau seluruh kegiatan program kerja. hal itu sesuai dengan pemaparan dari Kepala Desa Kedalingan jika ketika dana sudah cair ataupun sudah direkening kas desa, maka Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) melakukan pengajuan Surat Permohonan Pencairan (SPP) ,kalau surat tersebut sudah diverifikasi oleh Sekdes, Kades, serta Bendahara desa maka dana bisa dipakai untuk pelaksanaan kegiatan. Sesudah kegiatan selesai TPK melaporkan secara tertulis dana kegiatan tersebut dengan dilampiri bukti pendukung lainnya.³⁰

Kemudian, untuk pelaksanaan pembangunan melibatkan seluruh komunitas ataupun lembaga masyarakat, kelola sendiri

³⁰ Joko Waluyo, wawancara oleh penulis, 2 Juni 2022, wawancara 2, transkrip.

dengan memakai sumber daya ataupun bahan baku lokal, serta berusaha untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.³¹

Sama halnya dengan desa di kabupaten Tambakromo, pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai oleh dana desa. Mereka memilih sejumlah warga kurang mampu untuk dijadikan antek dalam menyusun program kerja perangkat desa secara fisik, termasuk aktivitas padat karya. hal itu sejalan dengan pernyataan pengelola perencanaan desa Ban Tambakromo serta setuju dengan pernyataan warga yang terlibat dalam pembangunan fisik program kerja desa. Deskripsi ada di bawah:

Sebaiknya memprioritaskan penduduk setempat terlebih dahulu. Karena itu, tujuannya juga pemberdayaan. Selain itu, petunjuk teknis menjelaskan jika Pekerjaan Padat Tunai (PKT) harus dipakai.³²

Sesudah dana desa masuk ke rekening keuangan desa, ketua tim pelaksana kegiatan (TPK) bakal menjalankan kegiatan sesuai jadwal kontraktor, disertai dengan dokumen rencana anggaran yang disetujui oleh sekretaris desa. Pengelola kegiatan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran kegiatan, sehingga apabila kegiatan mempunyai sisa anggaran, tim pelaksana kegiatan bakal mengembalikan sisa dana tersebut ke pembukuan desa serta membukukannya dalam pembukuan desa.

Akuntan kemudian menjalankan pengelolaan dengan mencatat semua pendapatan serta pengeluaran serta menutupnya dalam Buku Kas Umum, Buku Kas Subsidi, serta Buku Tabungan pada akhir bulan. Bendahara desa wajib membuat laporan keuangan bulanan untuk disampaikan kepada kepala desa.

Bahkan bendahara desa bisa menyimpan sejumlah uang tertentu pada keuangan desa untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan desa. Jumlah maksimum uang tunai yang disimpan di Kas Desa ditentukan dengan Peraturan Bupati/Walikota.³³ Menurut penjelasan dari Sekdes Tambahagung Kecamatan Tambakromo, batasan jumlah uang tunai yang disimpan dalam kas desa ialah senilai sepuluh juta rupiah saja.

³¹ Kemendes pdtt, "06 Tahun 2014, Undang-undang Desa," (31 Desember 2014).

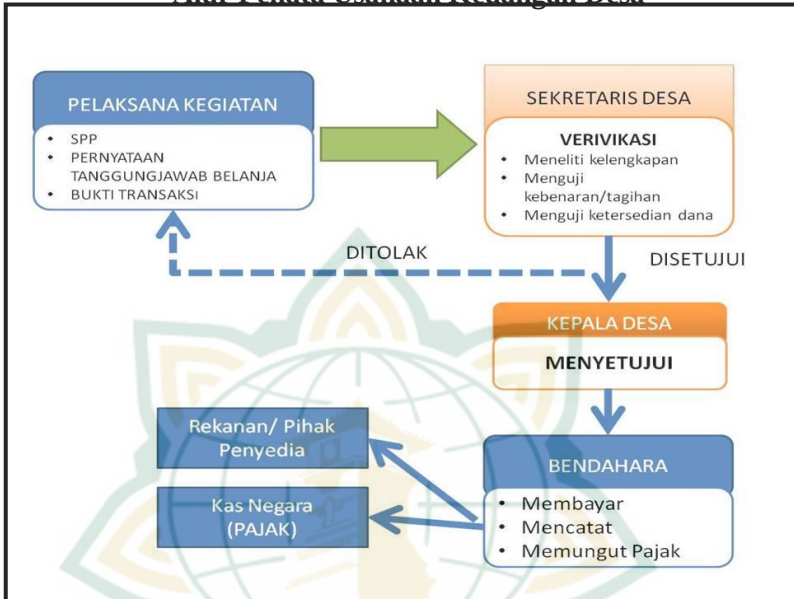
³² Irhamatus Sa'adah, wawancara oleh penulis, 10 Juni 2022, wawancara 4, transkrip

³³ Bely Dj, Widodo,dkk, "Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa" (Jakarta: BPKP, 2016), 71.

Adapun alur penatausahaan keuangan desa seperti berikut :

Gambar 4.3

Alur Penata Usahaan Keuangan Desa



Sumber : Juklak Pengelolaan Keuangan Desa BPKP 2019

Dalam menjalankan kegiatan TPK, pengeluaran jasa serta barang diperlukan untuk menjalankan program kerja pemerintahan desa. Setelah menerima barang serta kwitansi/faktur/nota, TPK harus melakukan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala desa untuk di konfirmasi oleh kepala desa.³⁴ SPP ialah dokumen yang berisi permintaan pembayaran ataupun persetujuan pengeluaran oleh pelaksana kegiatan, dokumen konfirmasi dari sekretaris desa (donor), serta dokumen persetujuan pembelian dari kepala desa (approver). Sebagai perintah bendahara desa (cocok). SPP termasuk dokumen penting dalam pembuatan Laporan Realisasi APBDesa. Seluruh kegiatan SPP yang ada pada akhir periode dijumlahkan untuk melakukan penentuan pengeluaran kumulatif untuk setiap kegiatan..³⁵

Pengajuan SPP ini disertai dengan Surat Pernyataan

³⁴ Bely Dj, Widodo,dkk, “Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa” (Jakarta: BPKP, 2015), 63

³⁵ Permendagri, “20 Tahun 2018, Pengelolaan keuangan desa,” (31 Desember 2018)

Tanggung Jawab Biaya (SPTB) serta sertifikat transaksi. SPTB termasuk iterasi dari SPJ yang dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan (TPK). Untuk persiapan pelaksanaan serta pengendalian APBDesa, lembar SPP bakal dibuat sebanyak tiga kali dengan informasi seperti berikut:³⁶

- a. Rangkap 1 (asli) untuk Bendahara Desa,
- b. Rangkap 2 untuk Sekretaris Desa,
- c. Rangkap 3 untuk Pelaksana Kegiatan (TPK).

Hal ini juga sesuai dengan pemaparan dari Kaur Keuangan Desa Tambaharjo pada tanggal 18 Juni 2022 jika setiap bakal membelanjakan sesuatu, TPK harus berkoordinasi dengan koordinator serta kepala desa, yang memerintahkan untuk mengambil jumlah yang dibutuhkan. Kemudian diserahkan kepada koordinator. Itu diserahkan oleh koordinator kepada TPK yang mengelolanya. Sesudah kegiatan dilaksanakan, TPK bertanggung jawab penuh atas SPJ kegiatan.³⁷

Agar petugas keuangan setiap desa membayar dana dari DD, koordinator yakni kepala desa harus menyetujui langsung sesuai instruksi sekretaris. Kemudian, sesudah uang dibayarkan, bendahara desa menyerahkannya kepada koordinator. Koordinator kemudian menyerahkan langsung kepada TPK yang mengelola program kerja pemerintah desa. Sesuai pasal 8 Permendagri 20 Tahun 2018, Sebagai petugas keuangan desa, Penangkap Keuangan mengelola simpanan, setoran/penarikan, pendapatan serta pengeluaran desa yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran desa, termasuk pembukuan. Penutupan buku ini dengan kepala desa tidak berbeda dengan proses administrasi desa. Pemerintah desa juga menjalankan prosedur administrasi sesuai dengan aturan yang ada saat ini yakni Permendagri No 20 Tahun 2018, dimana tugas akuntan desa ialah mencatat semua transaksi dengan bukti serta menutup pembukuan pada akhir bulan. Kepada kepala desa mengenai pertanggungjawaban pelaporan penyetoran serta penarikan. hal itu sudah sesuai dengan pernyataan Kaur Keuangan desa Sinomwidodo, jika tugas Kaur Keuangan yakni sebagai bendahara desa, mencatat semua transaksi, menutup buku pada akhir bulan, serta melaporkan kepada kepala desa mengenai pertanggungjawaban uang masuk serta keluar, saya catat manual di buku kas umum kemudian saya rinci di kas bantu sehingga memudahkan saya dalam membuat laporan. Kemudian sesudah

³⁶ Bely Dj, Widodo,dkk, “*Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa*,” 64.

³⁷ Sutopo, wawancara oleh penulis, 18 Juni 2022, wawancara 8, transkrip

semua selesai serta dilaporkan ke Kepala desa serta diteruskan ke laporan siskeudes online.³⁸

Dalam menjalankan prinsip Pemberdayaan, pemerintah desa di wilayah kecamatan Tambakromo menerapkan metode unik, yaitu mensosialisasikan, mengusulkan kepada masyarakat, serta membentuk tim penerima produk untuk mengecek silang produk atau barang bangunan yang dikirim ke panitia local. hal itu dijalankan untuk menciptakan prinsip partisipasi, kemandirian, serta transparansi. dan sesuai dengan keterangan dari salah satu Kepala Desa di wilayah Kecamatan Tambakromo yakni Desa Tambakromo, jika Pada Proses Pelaksanaan Pembangunan desa membentuk Tim Panitia Lokal, serta sebagai bentuk transparansi juga membuat tim penerima barang. Oleh karenanya, jika ada barang, panitia penerima barang setempat bakal mencatat. TPK kemudian melapor ke RT serta kepala desa mengkonfirmasi kembali barang yang dikirim ke panitia setempat. Jika masyarakat setuju serta tidak ada perbedaan, bermakna tujuan kita ialah memberdayakan masyarakat guna meraih pelaksanaan pembangunan.³⁹

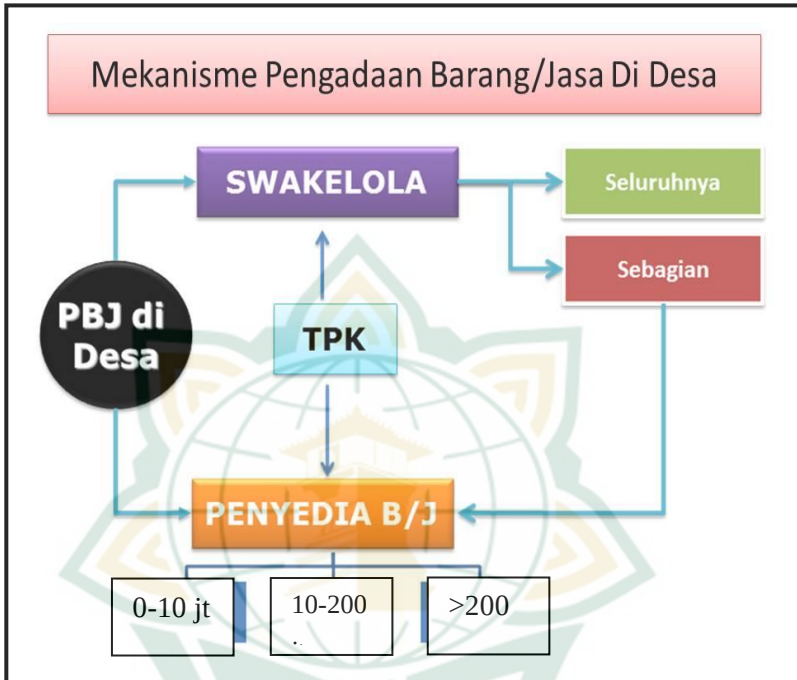
Agar setiap bendahara desa membayar uang dari dana desa, hal itu harus dijalankan di bawah arahan koordinator, sekretaris desa, serta disetujui langsung oleh kepala desa. Kemudian, sesudah uang dibayarkan, bendahara desa menyerahkannya kepada koordinator. Koordinator kemudian menyerahkan langsung kepada TPK yang mengelola program kerja pemerintah desa.

Pengadaan Barang dan Jasa di desa pertanggung jawaban sepenuhnya adalah Koordinator Tim Pelaksana Kegiatan. Dengan semangat penata kelolaan keuangan desa yang menggunakan sistem swakelola, pengadaan barang dan jasa perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah, sehingga secara nasional kegiatan pengadaan barang dan jasa diatur melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa. Dan dalam lingkup skala kabupaten pengadaan barang dan jasa diatur dalam peraturan bupati.

³⁸ Sutopo, wawancara oleh penulis, 18 Juni 2022, wawancara 8, transkrip

³⁹ Ahmad Su'udi, wawancara oleh penulis, 20 Juni 2022, wawancara 5, transkrip

Gambar 4.4
Alur Pengadaan Brang dan Jasa di Desa



Kegiatan Pengadaan Barang Jasa di desa ialah kewenangan Tim Pelaksana Kegiatan untuk menjalankan belanja aktivitas yang dilaksanakan secara swakelola. Adapun klasifikasi batasan nominal pengadaan barang jasa di desa secara spesifikasi diatur melalui perbup kabupaten Pati No. 80 tahun 2019 yakni jika pengadaan barang jasa dengan nilai sampai dengan 10 juta bisa dibelanjakan secara langsung, belanja barang jasa 10 sampai dengan 200 juta bisa dijalankan dengan sistem penawaran, serta lebih dari 200 juta memakai sitem lelang.⁴⁰

Dengan pengadaan barang jasa di desa harus dijalankan sesuai dengan regulasi yang ada.

4. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan padat Karya Tunai Dana Desa di Kecamatan Tambakromo

Monitoring ialah proses mengumpulkan serta menampilkan informasi secara sistematis terkait dengan pencapaian tujuan

⁴⁰ Perbup Kabupaten Pati ,80 Tahun 2019, “TatacaraPengadaan Barang Jasa di Desa” (26 Desember 2019)

tertentu, serta evaluasi terkait dengan proses monitoring, tetapi informasi yang dikumpulkan pada tingkat lebih lanjut dianalisa serta hasilnya ditinjau referensi untuk mengirim barang.⁴¹ Sehingga dalam aktivitas padat karya Tunai di kecamatan Tambakromo monitoring selalu di lakukan, hal itu sesuai apa yang diungkapkan oleh Kasi PMD Kecamatan Tambakromo dalam hasil wawancara jika Monitoring dijalankan oleh Semua Masyarakat, Tim Pendamping Kecamatan, Pendamping Desa, serta secara administrasi di audit oleh inspektorat ditingkat kabupaten⁴²

Artinya jika semua masyarakat mempunyai kewajiban untuk memantau proses kegiatan, begitu juga Dispermades, Tim Pendamping Kecamatan, Pendamping Desa, serta lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan program tersebut. Mereka mengawasi serta berpartisipasi dalam mensukseskan program aktivitas padat Karya Tunai sebagaimana yang disampaikan Kasi PMD kecamatan Tambakromo serta Sekdes Tambahagung, jika Masyarakat bisa memantau kegiatan, dengan melihat langsung pelaksanaannya, siapa saja yang ikut bekerja, sedangkan Tim Pendamping Kecamatan serta Pendamping Desa memonitoring dengan mengarahkan baik pelaksanaan fisik kegiatan ataupun pelaporan secara administrasi yang berupa Daftar hadir, Foto Kegiatan, Foto Kopy KTP, serta Daftar Penerimaan Honor Kegiatan.⁴³

Yang mempunyai kewajiban monitoring ialah dispermades selaku penanggung jawab program, Pendamping Kecamatan, Pendamping Desa, serta Pendamping Lokal Desa.⁴⁴

Sesudah Tim Kabupaten serta Tim Kecamatan mengadakan monitoring aktivitas padat Karya Tunai, selanjutnya beberapa catatan rekomendasi disampaikan ke Pemerintah desa sebagai bahan evaluasi pelaksanaan aktivitas padat Karya Tunai tahun yang bakal datang. Sehingga bisa diartikan jika evaluasi sebagai membanding antara akibat ataupun dampak program dengan rencana strategis yang sudah ditentukan. Dalam evaluasi pelaksanaan Padat Karya Tunai hasil monitoring oleh semua tim dijadikan rujukan untuk aktivitas yang bakal datang. Sebagaimana Lutfi Mustofa (2012) jika ada beberapa manfaat yang bisa di capai dalam Monitoring serta Evaluasi yakni :

⁴¹ M.Lutfi Mustofa. "Monitoring serta Evaluasi", UIN Maliki Press, 2021.11

⁴² Muhadi, wawancara oleh penulis, 23 Mei 2022, wawancara 1, transkrip

⁴³ Muhadi, wawancara oleh penulis, 23 Mei 2022, wawancara 1, transkrip

⁴⁴ Kabul Wahyudi, wawancara oleh penulis, 6 Juni 2022, wawancara 3, transkrip

- a. Para pengelola ataupun penanggung jawab program serta para stakeholder (termasuk pihak pemberi bantuan) perlu untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan program sudah mencapai tujuannya serta mengarah pada dampak yang diharapkan.
- b. Monitoring serta evaluasi menciptakan transparansi serta tanggung jawab yang lebih besar dalam kaitannya dengan sumber daya program.
- c. Informasi yang terkumpul ketika pelaksanaan monitoring serta evaluasi bakal menampilkan dasar pengambilan keputusan yang lebih jelas bagi pelaksanaa serta pengembangan program kedepan.
- d. Pelaksanaan serta pengembangan program yang bakal datang bakal ditingkatkan manakala ada pelajaran yang di bisa dalam pengalaman pelaksanaan program tersebut.

Oleh karenanya, pemantauan serta evaluasi Padat Karya Padat Tunai memberi kesempatan kepada masyarakat serta instansi terkait untuk melihat kemajuan ataupun kelemahan pelaksanaan program, serta melalui kegiatan pemantauan serta evaluasi, kemajuan program, masalah perencanaan serta evaluasi. untuk program aktivitas padat uang tertentu sudah memberi dampak positif bagi perekonomian masyarakat di kecamatan Tambakromo.

5. Pertanggung Jawaban Kegiatan padat Karya Tunai Dana Desa di Kecamatan Tambakromo.

Dalam memenuhi kewajiban, wewenang, hak serta kewajiban pengelolaan keuangan desa, tim pelaksana kegiatan wajib melaporkan kegiatannya kepada sekretaris desa serta kepala desa, yang wajib menyampaikan laporan berkala tengah tahunan serta tahunan. Bupati/Walikota, serta sebagian sudah diajukan ke BPD.

Dalam hal laporan tengah tahunan terdiri atas laporan periode sebelumnya yang disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan. Laporan akhir semester disampaikan paling lambat akhir Januari.

Sedangkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa bakal disampaikan kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun. Laporan ini disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat yang ditentukan dengan Peraturan Desa, dengan persetujuan Pemerintah Desa serta BPD. Oleh karenanya, Perdes ini bakal disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai Pasal 68 Permenkes No. 20 Tahun 2018. Laporan pelaksanaan harus dilaporkan paling lambat minggu kedua bulan

Juli tahun ini.

Wawancara memperlihatkan jika pemerintah desa bertanggung jawab sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018. Format laporan oleh pemerintah desa meliputi laporan tengah tahunan yakni semester sebelumnya serta akhir, serta laporan pertanggungjawaban. mengenai pelaksanaan pelaksanaan APBDes. hal itu sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Kasi PMD Kecamatan Tambakromo untuk pertanggungjawaban, sejak semester pertama sampai dengan semester terakhir disusun laporan pertanggungjawaban, serta pada akhir tahun dibuat laporan pertanggungjawaban serta lampiran-lampiran yang dipersyaratkan atas pelaksanaan pelaksanaan APBDes. Kami juga sudah menerapkan mekanisme akuntabilitas sesuai dengan petunjuk teknis peraturan (Juknis) yang ada dari Kabupaten serta Pusat.⁴⁵

Kasi PMD Kecamatan Tambakromo juga menyebutkan kendala-kendala yang sering terjadi selama proses pengelolaan keuangan desa. Kendalanya ialah keterlambatan dari pihak Kabupaten terkait perbub yang mengatur terkait pengelolaan Dana Desa, Pagu nominal Dana Desa, serta regulasi evaluasi. hal itu sangat berdampak pada keterlambatan penyusunan laporan yang dibutuhkan, keterlambatan pelaksanaan program kerja, serta keterlambatan pembayaran dana desa tahun depan. Sebenarnya pemerintah desa di wilayah kecamatan Tambakromo tahu ini salah, tetapi desa-desa sangat bergantung pada kabupaten sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa. hal itu sesuai dengan pemaparan dari Kepala Desa Tambakromo Kecamatan Tambakromo jika sejauh ini, baik-baik saja untuk mengumpulkan pertanggungjawaban jika terjadi kecacatan. Kendala datang di tengah, menunda perencanaan mekanisme pengelolaan dana masing-masing desa serta mempengaruhi proses pengelolaan dana semua desa, terutama pelaporan. Jika Anda terlambat melapor, pembayaran dana tahun depan juga bakal tertunda.⁴⁶

Semua aktivitas yang dibiayai dana desa direncanakan, dilaksanakan serta dievaluasi dengan terbuka dengan partisipasi masyarakat desa, begitujuga pada program Padat Karya Tunai selalu mengedepankan prinsip pemberdayaan, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pembangunan, serta pengawasan menjadikan program ini mendapatkan apresiasi yang positif dari masyarakat. sebagaimana yang disampaikan warga desa

⁴⁵ Muhadi, wawancara oleh penulis, 23 Mei 2022, wawancara 1, transkrip

⁴⁶ Su'udi, wawancara oleh penulis, 20 Juni 2022, wawancara 5, transkrip

Tambaharjo jika Masyarakat sangat senang serta terbantu dengan adanya aktivitas padat Karya Tunai, Karena bisa penghasilan tambahan.⁴⁷

Desa-desa di Kecamatan Tambakromo Menerapkan prinsip keterbukaan dalam proses akuntabilitas. hal itu terlihat dengan mensosialisasikan penggunaan dana DD melalui spanduk yang dipasang di kantor desa ketika acara-acara besar. hal itu sejalan dengan pernyataan Walikota Tambakuromo jika kami pemerintah desa bakal mencetak spanduk yang memberi informasi mengenai dana desa serta penggunaannya dalam rangka menjalankan prinsip akuntabilitas serta transparansi kepada masyarakat. Bagikan spanduk ketika diadakan acara berskala besar di community center supaya warga mengetahui dana desa yang diterima desa serta bagaimana penggunaannya.

Pemaparan dari salahsatu Kepala Desa Angkatan Lor Kecamatan Tambakromo yang ialah ketua pasopati hal tersebut di atas sesuai dengan pernyataan Pak Sarno dari Masyarakat Desa yang menyatakan jika memang benar adanya spanduk penggunaan dana desa yang selalu dipasang di kantor desa setiap kali diadakan acara. Mari kita lihat lebih dekat cara memakainya.

6. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan ekonomi masyarakat memperkuat kepemilikan faktor produksi, memperkuat kontrol penjualan serta pemasaran, memberdayakan masyarakat untuk menerima gaji/upah yang layak, serta mendorong masyarakat untuk menerima informasi, pengetahuan serta keterampilan. untuk diimplementasikan dalam beberapa aspek, baik dari aspek masyarakat itu sendiri ataupun aspek kebijakan pemerintah.

Dalam aktivitas padat Karya Tunai bisa ditinjau dari beberapa hal yakni penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai adanya program Padat Karya Tunai sebagaimana yang disampaikan Ketua Tim Pelaksana Kegiata desa larangan. jika Tenaga kerja diutamakan dari masyarakat lokal dengan cara mengidentifikasi serta memberi informasi kegiatan tersebut, selain itu juga di dalam juknis jelas harus memakai Padat karya Tunai (PKT) di sarankan masyarakat yang mungkin tidak mampu,warga yang tidak bekerja karena PHK, setengah penganggur, anggota keluarga dengan gizi balita buruk serta Ibu kepala Keluarga kurang

⁴⁷ Sudardi, wawancara oleh penulis, 19 Mei 2022, wawancara 10, transkrip

mampuyang mendapat kesempatan untuk bekerja.⁴⁸

Sedangkan Upah yang didapat masyarakat yang mengikuti aktivitas padat Karya Tunai senilai Rp.90.000,00 (Sembilan Puluh Ribu Rupiah) perhari, sebagaimana yang disampaikan bapak sudardi warga desa Tambaharjo.⁴⁹ Beliau sangat berterimakasih dengan adanya program Aktivitas padat Karya Tunai, karena dengan tambahan pendapatan maka beban ekonomi menjadi lebih ringan.⁵⁰

Adapun aspek kebijakan pemerintah desa di kecamatan Tambakromo dalam aktivitas padat Karya Tunai bisa ditinjau dari jumlah anggaran yang di rencanakan untuk kegiatan tersebut. Adapun besarnya penganggaran yang direncanakan oleh pemerintah desa se kecamatan Tambakromo tahun 2021 ialah seperti berikut :

Tabel 4.15
Realisasi Kegiatan padat Karya Tunai Dana Desa
Kecamatan Tambakromo Tahun 2021

N o	Desa	Realisasi Anggara n Bidang Pemban gunan	Upah	Tena ga Kerj a (ora ng)	Pros entas e (%)
1	PAKIS	239.590. 000	43.560.0 00	84	18
2	MAITAN	714.506. 000	404.560. 000	341	57
3	WUKIRSARI	869.098. 000	307.190. 000	237	35
4	SINOMWIDODO	626.504. 000	228.677. 000	373	37
5	KEBEN	391.900. 000	87.310.0 00	936	22
6	LARANGAN	583.136. 000	174.370. 000	98	30
7	TAMBAKROMO	764.742. 000	177.280. 000	209	23

⁴⁸ Irhamatus Sa’adah, wawancara oleh penulis, 10 Juni 2022, wawancara 4,transkrip

⁴⁹ Sudardi, wawancara oleh penulis, 19 Mei 2022, wawancara 10, transkrip

⁵⁰ Sudardi, wawancara oleh penulis, 19 Mei 2022, wawancara 10, transkrip

8	MOJOMULYO	540.150. 000	151.100. 000	1250	28
9	KARANGAWEN	630.815. 000	155.370. 500	171	25
10	MANGUNREKSO	692.828. 980	225.100. 000	182	32
11	TAMBAHARJO	180.515. 000	24.640.0 00	44	14
12	TAMBAHAGUNG	21.000.0 00	20.000.0 00	39	95
13	SITIREJO	535.161. 000	136.530. 000	611	26
14	KEDALINGAN	484.627. 000	138.690. 000	1488	29
15	KARANGMULYO	528.457. 000	124.570. 000	164	24
16	KARANGWONO	559.611. 000	148.310. 000	1153	27
17	ANGKATAN LOR	899.412. 000	247.160. 000	203	27
18	ANGKATAN KIDUL	224.542. 500	59.260.0 00	180	26
Jumlah		9.486.59 5.480	2.853.67 7.500	7.76 3	30

Keterangan : Sumber Siskeudes 2021

Dari tabel tersebut bisa ditinjau jika anggaran yang di realisasikan untuk kegiatan Pembangunan Rp. 9.486.595.480,00 dengan besaran upah Rp.2.853.677.500,00 serta melibatkan pekerja 7.763 dengan prosentase 30% antara realisasi kegiatan serta upah.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Implementasi Padat Karya Tunai (PKT) dana desa di Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati Tahun 2021
 - a. Perencanaan

Berdasarkan keterangan Kasi PMD Kecamatan Tambakromo bahwa pemerintah desa di wilayah Kecamatan Tambakromo telah melakukan prosedur perencanaan kegiatan Dana Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan

Keuangan Desa. Setelah melakukan wawancara dan mencocokkan dengan peraturan yang berlaku maka pemerintah desa di wilayah kecamatan Tambakromo, bahwa Perencanaan Pengelolaan Dana Desa sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Adapun kegiatan tersebut dimulai dari melakukan Musdus, RPJMDesa, Musrenbangdes, penyusunan RKPDesa, dan APBDesa. Begitu juga dengan proses perencanaan kegiatan Padat Karya Tunai dana desa telah di laksanakan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

b. Pelaksanaan

Dalam proses pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Dana Desa, Pemerintah desa se kecamatan Tambakromo pada tahun 2021 sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018.

Yaitu dengan menyusun Rencana Anggaran Belanja(RAB) Padat Karya Tunai, Setelah itu membuat SPP untuk mencairkan dana guna membiayai program kerja yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, mekanisme pelaksanaan kegiatan Kegiatan Padat Karya Tunai Dana Desa di wilayah Kecamatan Tambakromo telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Melalui Program Kegiatan Padat Karya Tunai pemerintah desa di kecamatan Tambakromo telah berupaya menanggulangi kemiskinan, menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan stunting.

Kegiatan padat karya tunai sudah dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumberdaya alam, teknologi dan sumberdaya manusia di Desa dengan memanfaatkan pembiayaan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa sekitar 30% (tiga puluh persen) digunakan membayar upah masyarakat Desa dalam rangka menciptakan lapangan kerja. Sedangkan dalam penatausahaannya, desa-desa di kecamatan Tambakromo telah menggunakan sistem yang telah memanfaatkan Teknologi Informasi (TI) yaitu dengan menggunakan aplikasi yang telah dikembangkan oleh BPKP.

Desa-desa di wilayah Kecamatan Tambakromo telah menggunakan aplikasi Siskeudes online, dimana semua data penganggaran, penata usahaan dan pelaporan dapat dipantau

oleh Kecamatan, Kabupaten dan pendamping desa setiap saat, sehingga Progres administrasi pelaksanaan Kegiatan selalu terpantau.

c. Pelaporan

Dalam Permendagri No.20 Tahun 2018, format laporan pertanggungjawaban yang dihasilkan oleh pemerintah desa bakal mencakup laporan setengah tahunan di bulan Juli serta akhir Januari, serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pelaksanaan APBDesa. Sebulan sesudah tahun anggaran berakhir, dilampirkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pelaksanaan APBDesa pada tahun anggaran yang bersangkutan, laporan kekayaan desa per 31 Desember tahun anggaran, serta program pemerintah serta pemerintah daerah.

Kepala desa kecamatan Tambakromo mengatakan pemerintah desa bertanggung jawab di seluruh bentuknya sesuai dengan aturan yang ada. hal itu meliputi pertanggungjawaban pelaksanaan aktivitas padat Karya Tunai, dimulai dengan laporan semesteran, serta perincian pertanggungjawaban pelaksanaan pelaksanaan APBDesa serta lampiran-lampiran yang menyertainya sesuai dengan aturan yang ada. Peraturan saat ini harus menjalankannya.

Meskipun demikian masih ada kendala terkait dengan Penyajian Laporan yang tidak tepat waktu dikarenakan Sumber Daya Manusia dari aparatur pemerintah desa yang beragam, serta banyaknya kegiatan di desa yang wajib diselesaikan. Tetapi secara umum desa-desa di kecamatan Tambakromo sudah menyelesaikan Laporan Realisasi APBDesa Tahun 2021, serta sudah dimonitoring dari dispermades ataupun inspektorat.

2. Analisis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui Program Padat Karya Tunai (PKT) di Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati Tahun 2021

Dalam menganalisis kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati Peneliti menggunakan teori **ACTORS** yang dikembangkan oleh Sarah Cook dan Steve Macaulay, adapun kerangka analisis yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. *Authority* (Kewenangan)

Dalam Kegiatan Padat Karya Tunai Dana Desa di Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati Tahun 2021, masyarakat diberi kewenangan untuk mengusulkan program Kegiatan baik yang berupa fisik maupun non fisik, kegiatan

fisik berhubungan dengan kegiatan pembangunan sarana prasarana pedesaan, dan kegiatan non fisik berupa kegiatan pelatihan, penyertaan modal dan lain-lain. Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat adalah mengusulkan ide-ide serta gagasan perencanaan pembangunan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang diselenggarakan setiap tahun, disamping itu masyarakat juga diberi kewenangan untuk ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut.

b. *Confidence and competence*, (Percaya diri dan kemampuan)

Dalam Kegiatan Padat Karya Tunai Dana Desa di Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati Tahun 2021, Pemerintah desa telah melibatkan masyarakat miskin, pengangguran, untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan Pelaksanaan Padat Karya Tunai Dana Desa, terbukti masyarakat yang terlibat dalam kegiatan tersebut selalu hadir dalam setiap undangan musyawarah perencanaan desa. Dengan demikian dapat membangkitkan rasa percaya diri dari masyarakat miskin untuk ikut serta dalam pembangunan, karena sesungguhnya mereka mempunyai kemampuan yang harus dikembangkan.

c. *Trust*, (Keyakinan)

Dalam Kegiatan Padat Karya Tunai Dana Desa Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati Tahun 2021, Masyarakat Miskin, Pengangguran selalu diikutsertakan menjadi bagian pelaksana kegiatan, dengan kemampuan yang dimiliki, mereka dilatih untuk bekerja sesuai perannya masing-masing, sehingga kegiatan tersebut mampu menimbulkan keyakinan bahwa mereka mempunyai potensi untuk merubah dan mereka harus bisa (mampu) untuk merubahnya.

d. *Opportunities*, (Kesempatan)

Dalam Kegiatan Padat Karya Tunai Dana Desa di Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati tahun 2021, Masyarakat Miskin dan Pengangguran telah diberi kesempatan untuk ikut bekerja, mereka juga diberi kesempatan untuk menentukan arah kegiatan pembangunan, mereka diberi kesempatan untuk mengusulkan program-program yang dapat didanai oleh Dana Desa sehingga mereka diberi kesempatan untuk memilih apa yang

menjadikeinginannya, mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang ada dalam diri masyarakat itu sendiri.

e. *Responsibilities*, (Tanggung Jawab)

Dalam Kegiatan Padat Karya Tunai Dana Desa di Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati Tahun 2021, Masyarakat Miskin, Pengangguran disamping dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, mereka juga diberi tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaannya, saling mengingatkan satu dengan yang lain tentang tanggung jawab pekerjaannya, dan selalu bergotong royong dalam menyelesaikan pekerjaannya. Dengan demikian maka mereka selalu diarahkan melakukan pengelolaan Pekerjaan dengan Penuh Tanggung Jawab dan lebih baik.

f. *Support*, (Dukungan)

Dalam Kegiatan Padat Karya Tunai Dana Desa di Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati Tahun 2021, Masyarakat Miskin dan Pengangguran selalu mendapat dukungan dan perhatian khusus baik dari Kabupaten (Organisasi Pemerintah Daerah) , Kecamatan selaku Pendamping tingkat Kecamatan, dan Pemerintah Desa, agar tidak warga masyarakat miskin, pengangguran yang tidak tersentuh program-program bantuan social khususnya Padat Karya Tunai Dana Desa. Sehingga dari sisi ekonomis, sosial dan budaya mereka selalu dilibatkan, dimotivasi dan diarahkan untuk lebih baik.

Selain Hal tersebut diatas bahwa Keberdayaan Masyarakat juga dapat dengan berbagai prinsip yaitu :

1) Prinsip Motivasi

Motivasi diri ialah bentuk dorongan semangat guna memberi peningkatan kinerja.⁵¹ Masyarakat yang teribat dalam aktivitas padat Karya Tunai dibentuk kelompok kerja serta diberi pengarahan dalam menjalankan pekerjaannya, begitu juga dalam hal perencanaan aktivitas padat Karya Tunai masyarakat dilibatkan untuk memberi masukan sehingga mereka percaya diri.

Hal itu sesuai apa yang diungkapkan oleh Kasi PMD kecamatan Tambakromo, serta kepala-kepala desa di kecamatan Tambakromo jika masyarakat dilibatkan dalam hal perencanaan kegiatan sebagai bentuk motivasi dari upaya

⁵¹ Veithzal Rivai Zainal dkk, .”Islamic Human Capital Management.Manajemen Sumber Daya Insani ”, Rajawali Press.Jakarta,2014.375

memotivasi masyarakat kurang mampu, sehingga mereka percaya diri untuk berpartisipasi dalam pembangunan di desa.

2) Prinsip Peningkatan kesadaran dan kemampuan

Peningkatan kesadaran diri serta kemampuan ialah upaya untuk mengenali diri sendiri serta peka terhadap pengelolaan emosional pribadi untuk menggali serta memberi peningkatan kemampuan yang terpendam pada dirinya.⁵² Orang yang menghargai diri sendiri bermakna dia mengenal dirinya sendiri dengan baik. Ia mampu mengendalikan dirinya, misalnya dengan mengendalikan emosi serta impuls lainnya. Dengan mengenal dirinya sendiri, ia bisa mengenal orang lain serta membaca niat serta keinginannya.

Dengan mengikutsertakan masyarakat kurang mampu dalam pelaksanaan aktivitas padat Karya Tunai ialah bentuk peningkatan kesadaran serta Sumber Daya Manusia, mereka diberi kepercayaan untuk bekerja sesuai dengan kemampuannya serta sadar atas kapasitasnya dalam bekerja sehingga upah yang diterima sesuai dengan kemampuan kapasitasnya. hal itu sesuai apa yang diungkapkan oleh ketua TPK di kecamatan tambakromo jika masyarakat yang diikutsertakan dalam aktivitas padat Karya Tunai ditempatkan sesuai dengan kapasitasnya, serta digaji standar indek kabupaten Pati.

3) Prinsip Manajemen diri

Manajemen diri bermakna menyeimbangkan hidup, waktu, pilihan, minat, penggunaan aktivitas, serta pikiran serta tubuh. Ia juga mendorong diri, mengelola semua unsur pribadi, mengendalikan potensi kehendak guna meraih berbagai hal yang baik, serta berbagai aspek kehidupan pribadi supaya lebih sempurna.⁵³

Dalam Hal aktivitas padat Karya Tunai dana desa di kecamatan Tambakromo pemerintah desa terus berupaya melibatkan serta mendorong supaya perekonomian masyarakat yang kurang mampu segera bangkit. serta masyarakat yang terlibat dalam kegiatan tersebut berpartisipasi aktif, hal itu sesuai apa yang disampaikan Sekdes Tambahagung, serta tokoh masyarakat di desa Tambakromo, jika masyarakat sangat antusias dalam

⁵² Daniel Goleman, "Emotional Intelligence," PT.Gramedia.Jakarta.2022.65

⁵³ Hanum Jazimah, "Implementasi Manajemen Diri Mahasiswa dalam Pendidikan Islam," jurnl Kajian Pendidikan Islam, Vol.6,2 Desember 2014.1

mengikuti aktivitas padat Karya Tunai, karena dari semua peserta tidak ada yang mengundurkan diri.

4) Prinsip Mobilisasi Sumberdaya

Mobilisasi Sumberdaya ialah sarana masyarakat umum, baik informal ataupun formal, yang dipergunakan untuk memobilisasi serta melibatkan individu ataupun kelompok masyarakat untuk bergerak.⁵⁴ Mobilisasi Sumberdaya sangat penting yang wajib digali serta dikembangkan dalam masyarakat untuk membangkitkan semangat gotong royong.

Gotong royong ialah suatu keadaan dinamis yang merepresentasikan usaha bersama, kedermwanan, kerja keras ataupun gotong royong, serta perjuangan tolong-menolong.⁵⁵ Gotong royong di desa terutama di kecamatan Tambakromo masih sering dijalankan biasanya kegiatan tersebut bertepatan dengan proses pendirian rumah, normalisasi saluran air serta lain sebagainya.

Mobilisasi sumberdaya yang menumbuhkan gotong royong dijalankan masyarakat pada aktivitas padat Karya Tunai dana desa di Kecamatan Tambakromo, hal itu sesuai apa yang disampaikan parakepala desa serta ketua TPK di kecamatan Tambakromo jika masyarakat yang dilibatkan dalam aktivitas padat Karya Tunai Dana Desa bahu membahu dalam pekerjaan penanggulangan bencana, normalisasi saluran irigasi, pengurugan jalan baru, serta pembangunan jalan usaha tani. Meskipun mereka tetap mengharapkan upah, tetapi semangat gotong royong yang digali dari mobilisasi sumberdaya tetap menjadi prioritas.

5) Prinsip Pembangunan Ekonomi

Makna Pembangunan disini ialah suatu proses multi dimensi yang didalamnya terjadi suatu "*Structural Change*" dari sikap, mental sosial, intitusi termasuk target capaian pembangunan seperti percepatan pertumbuhan serta masalah kemiskinan.⁵⁶ Pembangunan ekonomi dalam pandangan tradisional masih identik dengan pendapatan perkapital.

Pembangunan ekonomi menjadi bagian dari seluruh usaha masyarakat guna memberi peningkatan

⁵⁴ Nia Nadia."Mobilisasi Sumberdaya Dalam Aksi Kamisan."Skripsi.Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.Jakarta.2019.22

⁵⁵ Tadjuddin Noer Effend."Budaya Gotong-Royong Masyarakat dalam Perubahan Sosial Saat Ini." Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 2 No.1 , Mei 2013.5

⁵⁶ Fitri amalia dkk."Ekonomi Pembangunan."Widina bhakti persada.bandung.2022.5

perekonomiannya, melalui peningkatan pendapatan serta pembangunan sosial, politik, serta kebudayaan. sehingga pembangunan ekonomi bisa diartikan sebagai proses peningkatan pendapatan perkapita dalam periode yang panjang.

Aktivitas padat Karya Tunai Dana Desa diantaranya mempunyai tujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi masyarakat, yakni dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu yang masuk pada program Padat Karya Tunai Dana Desa. Hal itu sesuai apa yang diungkapkan oleh ketua TPK di Kecamatan Tambakromo jika masyarakat yang mengikuti program Padat Karya Tunai Dana Desa memperoleh honor ataupun pendapatan untuk tukang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)per hari serta pekerja kasar Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per hari, honor tersebut diberikan setiap satu minggu sekali. Dengan demikian proses pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui aktivitas padat Karya Tunai sudah tercapai. Waupun penghasilan tersebut belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi paling tidak mampu memberi peningkatan serta meringankan beban masyarakat kurang mampu.

3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam perspektif Syariah.

Di sisi lain, dari perspektif ekonomi syariah, dampak aktivitas padat karya mencakup pekerjaan fisik serta non-fisik yang perlu bermanfaat, serta bukan sebaliknya. Islam melarang orang berbuat salah kepada orang lain ataupun memakai aturan yang tidak adil guna mendapat kekayaan, tetapi mendorong penggunaan semua cara secara adil serta jujur guna mendapat kekayaan. Karena sumber daya alam ialah berkah dari Allah SWT, maka potensi sumber daya ekonomi serta kekayaan materi harus dikelola dengan baik. Kepada rakyatnya. Masyarakat didorong untuk mengelolanya dengan tetap memperhatikan kelestariannya.

Tentunya untuk memanfaatkan karunia Tuhan, kita memerlukan orang-orang (SDM) yang bisa menciptakan efisiensi, efektivitas, serta produktivitas dengan mengoptimalkan produk yang mereka hasilkan. Bakat ialah potensi bakat yang bisa dikembangkan untuk proses produksi guna memberi peningkatan kehidupan ekonomi masyarakat. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat sebenarnya dianjurkan pada ajaran Islam, sebab tujuan ekonomi syariah ialah untuk menciptakan kehidupan manusia yang aman serta sejahtera.

Ekonomi ialah bagian dari tatanan Islam, menempatkan ekonomi di tengah serta menyeimbangkannya secara adil. Dengan kata lain, dalam bidang ekonomi ialah keseimbangan dalam arti modal serta usaha, produksi serta konsumsi, serta keseimbangan produsen serta konsumen. hal itu dianggap antara kelompok serta masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat sama dengan upaya mengembangkan masyarakat, baik pengembangan individu ataupun kolektif. Upaya mengembangkan masyarakat dalam Islam mengacu pada pemberdayaan dalam tiga potensi dasar manusia: potensi rasional, potensi fisik, potensi hati, ataupun lebih khusus tatanan intelektual, ekonomi serta spiritual. Potensi paling berharga serta mahal yang hanya dimiliki manusia ialah akal (intelekt). Bahkan Allah memperingatkan hamba-hamba-Nya supaya tidak memakai hati mereka. Allah SWT berfirman pada Q.S Yunus ayat 100:⁵⁷

وَمَا كَانَتْ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَتَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى
الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٠﴾

Artinya: “Dan tidak seorang pun bakal beriman kecuali dengan izin Allah, serta Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti.” (Q.S Yunus: 100)

Semua aktivitas manusia didasarkan pada bagian jika pengetahuan, kecerdikan, serta potensi pikiran yang ada harus dioptimalkan serta dijalankan guna meraih tujuan. Islam menganggap akal sangat penting untuk manusia, sehingga segala aktivitas serta tindakan manusia harus diperhatikan terlebih dahulu.

Kemungkinan dasar ini memungkinkan orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarganya. Pendapatan yang dihasilkan oleh masyarakat bisa dipakai tidak hanya untuk membeli jasa serta barang, tetapi juga untuk tujuan menabung serta berinvestasi.

Upaya pemenuhan kebutuhankebutuhan tersebut sudah

⁵⁷Departemen Agama RI, “Al Qur’an serta terjemahannya”. (Bandung: CV Penerbit Diponegoro 2015)

dicantumkan pada Q.S Al-Jumu'ah ayat 10:⁵⁸

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Apabila sholat sudah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah serta ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”

Ayat tersebut memberi tahu orang-orang untuk bergerak serta berharap untuk memenuhi kebutuhan mereka. Karena pada hakekatnya bekerja dengan niat menjalankan perintah Allah ialah ibadah yang patut disyukuri. Dalam Islam, bekerja ialah kewajiban manusia. Tuhan menciptakan bumi serta isinya dengan tujuan guna memberi kemudahan manusia menata kehidupan yang sangat ideal serta dinamis. Seperti pemberdayaan masyarakat, ini mendorong orang untuk menjadi lebih mandiri dengan mengandalkan kemampuan mereka tanpa batas. Dalam proses pemberdayaan masyarakat, mereka bisa melihat serta memilih sesuatu yang bermanfaat bagi mereka.

Dari perspektif ekonomi Islam, pemberdayaan ekonomi tentu bisa ditinjau dalam berbagai prinsip ekonomi syariah:⁵⁹

1) Prinsip Tauhid

Tauhid bermakna beriman kepada Allah SWT di seluruh kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh seluruh umat Islam sebagai perintah ibadah. Oleh karenanya, tauhid termasuk dasar ajaran Islam. Dalam tauhid, kita bisa melihat jika tidak ada yang berhak disembah selain Allah SWT, serta tidak ada pemilik langit serta bumi selain Allah. Sebagaimana Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 107 :

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ
دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٠٧﴾

⁵⁸ Departemen Agama RI, “Al Qur'an serta terjemahannya.” (Bandung: CV Penerbit Diponegoro 2015)

⁵⁹ M. Nur Rianto, “Dasar-Dasar Ekonomi Islam,” Jakarta: PT. Era Intermedia, 2011.10

Artinya : “*Tidakkah kamu tahu jika Allah mempunyai kerajaan langit serta bumi? serta tidak ada bagimu pelindung serta penolong selain Allah*”.(Al-Baqarah: 107).⁶⁰

Kegiatan ekonomi yang berlangsung harus bertanggung jawab, karena tidak hanya menekankan pada nilai ekonomi tetapi juga menaati perintah Tuhan. Dalam Program Konsentrasi Kas Dana Desa Kecamatan Tambakromo sudah menjadi kewajiban masyarakat serta seluruh umat Islam supaya senantiasa menegakkan perintah Allah serta menjauhi larangan.

2) Prinsip bekerja serta produktifitas

Prinsip kerja serta produktivitas dalam ilmu ekonomi menyatakan jika individu harus berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan finansialnya guna mencapai tingkat produktivitas yang tinggi menurut batasan Islam. Dalam Program Padat Tunai Dana Desa, tentunya masyarakat berupaya untuk mentransformasikan diri menjadi lebih baik, lebih berwawasan serta mampu bekerja di lapangan. Program padat karya yang dijalankan masyarakat memungkinkan dana desa menambah pendapatan serta berdampak positif bagi perekonomian.

Kerja ialah senjata pertama dalam memerangi kemiskinan. Pekerjaan ialah penyebab utama dari penciptaan kekayaan serta elemen utama dari upaya untuk mensejahterakan diri kita sendiri serta planet Allah. Dengan dukungan sistem serta peraturan Islam, tidak ada pekerja yang tidak menerima upah sebagai hasil jerih payah serta keringatnya. Urutan kerja ini terkait dengan posisi serta tujuan keberadaan manusia di planet ini.

Kegiatan di segala bidang, termasuk segala aktivitas serta pekerjaan manusia, sesungguhnya dijalankan dalam rangka pengabdian serta ibadah kepada-Nya, sebagaimana dalam QS. Al-An'am ayat 162:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾

Artinya : “*Katakanlah (Muhammad), “Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku serta matiku*

⁶⁰ Departemen Agama RI, “*Al Qur'an serta terjemahannya*.” (Bandung: CV Penerbit Diponegoro 2015)

hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam,”(Q.S. Al An’am: 162)⁶¹

Dari ayat diatas bisa kita Tarik simpulan jika sesungguhnya manusia bekerja mempunyai dua fungsi, yakni sebagai hamba Allah serta sebagai khalifah Allah. Sebagai hamba Allah (abdullah) manusia mempunyai tugas untuk mengabdikan (beribadah kepada Allah) serta sebagai Khalifah Allah manusia menjadi wakil Allah serta kekuasaan-Nya untuk mengurus bumi dengan segala isinya serta memakmurkannya.

3) Prinsip Ta’awun (Tolong menolong)

Dalam berbisnis, Islam mengajarkan Islam untuk saling membantu di seluruh keadaan serta situasi, ataupun saling mengejek, serta saling bekerjasama serta tidak hanya mempertimbangkan kepentingan bisnis. Saling membantu ialah prinsip dasar kerjasama. Aktivitas padat karya yang dibiayai desa membantu memberi peningkatan taraf hidup masyarakat kurang mampu, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat lemah, prinsip ekonomi taaung ataupun gotong royong menjadikan masyarakat yang kuat lebih rukun serta sejahtera. Prinsip ini didasarkan dalam firman Allah Swt seperti berikut QS. Al-Ma’idah ayat 2 yakni :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهَرَ الْحَرَامَ وَلَا
الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنْ
رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ
أَن صَدَّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى
الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman!
Janganlah kamu melanggar syiar-syiar
kesucian Allah, serta jangan (melanggar

⁶¹ Departemen Agama RI, “Al Qur’an serta terjemahannya.” (Bandung: CV Penerbit Diponegoro 2015)

kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) serta qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), serta jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia serta keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu sudah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). serta tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan serta takwa, serta jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa serta permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”(QS. al-Ma'idah :2)⁶²

Sesuai dengan prinsip ekonomi di atas, ketiga prinsip ekonomi di atas sejalan dengan aktivitas padat dana desa di Kecamatan Tambakromo, yang dijalankan tidak hanya di masyarakat tetapi juga dalam pelaksanaan program padat uang. memahami. Terlibat dalam urusan dunia tetapi masih mematuhi aturan ataupun larangan Islam ketika mencoba bekerja untuk Rizuki untuk memenuhi kebutuhan keuangan keluarganya.

Melalui pekerjaan seseorang bisa memenuhi segala kebutuhannya. Tetapi di dunia modern, keahlian diperlukan. hal itu diperlukan untuk bersaing di dunia bisnis. Salah satu cara guna meraihnya ialah melalui pendidikan serta pelatihan guna memberi peningkatan keterampilan. Manusia ialah satu-satunya sumber daya yang mempunyai perasaan, keinginan, kemampuan, serta rasa pengetahuan. Semua bakat potensial ini mempengaruhi pencapaian tujuan. Terlepas dari kemajuan teknologi, perkembangan informasi, ketersediaan modal, serta sumber daya yang tepat, organisasi yang tidak manusiawi merasa sulit guna meraih tujuan mereka.

⁶² Departemen Agama RI, “*Al Qur'an serta terjemahannya.*” (Bandung: CV Penerbit Diponegoro 2015)

Tujuan dari Program Intensif Tunai ini ialah untuk membimbing serta mendukung masyarakat guna mendapat informasi, pengetahuan serta keterampilan yang bermanfaat, yakni membantu kelompok rentan memberdayakan serta memenuhi dasar-dasarnya. Kita harus mencegah mereka hidup dalam kemiskinan.

Upaya mengembangkan masyarakat termasuk upaya untuk mempercepat tujuan. Community development diharapkan bisa menghasilkan pengetahuan baru di masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu, menambah wawasan kebersamaan, menyelesaikan serta mengubah pola pikir masyarakat, serta menjadikan mereka lebih mandiri. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat mempunyai tujuan untuk membimbing serta mendukung kelompok masyarakat guna memberi peningkatan pendapatan yang dimiliki. Pemberdayaan ini tidak terlepas dari pendampingan desa (PD) serta pendamping desa (PLD) kementerian desa kabupaten Tambakromo. Ikatan yang kuat sengaja dibangun bersama guna memberi peningkatan taraf hidup serta mewujudkan keluarga sejahtera, bukan mencari keuntungan sepihak, demi memberi peningkatan perekonomian secara lebih efisien serta efektif.

